

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil audit pemerintah berupa opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat persepsi korupsi di pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0.829 terhadap persepsi korupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Heriningsih dan Marita, 2012.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 3.792 terhadap persepsi korupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Liu dan Lin, 2012.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 3.904 terhadap persepsi korupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Masyitoh dkk , 2015, Liu dan Lin, 2012, dan Umar, 2012.

6.2 Saran

Penelitian mengenai tingkat persepsi korupsi pemerintah daerah provinsi NTT, yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran di bawah ini:

1. Untuk pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur, agar tetap mempertahankan opini audit yang telah didapat yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
2. Untuk pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur, agar lebih mengutamakan tindak lanjut audit agar mengurangi tingkat korupsi dan persepsi korupsipun ikut menurun.
3. Pada Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi variabel persepsi korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Boynton, W.C dan Johnson. 2003. *Modern Auditing*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II*
- Coram, P. Ferguson, C. dan Moroney, R. 2008. *Internal Audit, Alternative Internal Audit Structures and The Level of Misappropriation of Assets Fraud*. Accounting and Finance, vol 48, hal. 543-559.
- Effendy, Yuswar. 2013. *Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK dengan Kasus Korupsi pada Pemda di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor)*. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 13 No. 01.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review*. *The Academy of Management Review*, vol. 14, No. 1, hal 57-74.
- Fadjar, Mukti. 2002. *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam pengantar Kurniawan, L. 2002. Menyingkap Korupsi di Daerah*. Intrans Malang.
- Ferraz, C., and Finan, F. 2011. *Electoral accountability and corruption: Evidance from the audits of local government*. American Economic Review 101 (4).
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*. Cetakan keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang
- Heriningsih dan Marita. 2013. *Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa)*. Buletin Ekonomi Vol 11 No. 1.
- Hendropuspito, D, 1989. *Sosiologi Sistemika*. Kanisius. Yogyakarta.
- Huefner, Ronald J. 2011. *Fraud risks in local government: An analysis of audit findings*. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, vol. 3, issue 3, hal. 111-125.
- Indonesia Corruption Watch*. 2015. *Laporan Tren Korupsi Semester I 2015*.
- Ismunawan. 2016. Tesis: *Pengaruh Faktor non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
- Jahja, Juni Syafrien. 2012. *Say No to Korupsi*. Jakarta: Visimedia. 2012. Hal. 78.
- Kejaksaan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2015*
- Lane, J.E. (2000). *NewPublic Management*. Routledge , London.

- Liu, J. and Lin, B. 2012. *Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data*. *China Journal of Accounting Research*, vol. 5. Hal. 163-186
- Masyitoh, Wardhani dan Setyaningrum. 2015. *Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Rakhmat, J, 2000. *Psikologi Komunikasi, edisi revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rinaldi. Taufik., Marini Purnomo, dan Dewi Damayanti. (2007). *Memerangi korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi : studi kasus penanganan korupsi pemerintah daerah*. Jakarta : Justice for the Poor Project, Bank Dunia.
- Rini dan Liska Damiati. 2017. *Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Audit terhadap Korupsi*. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, vol.4
- Rini dan Sarah. 2014. *Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Etikonomi* Vol. 13 No. 1
- Shadily, Hasan, 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Shah, Anwar, (Editor). 2007. *Performances Accountability and Combating Corruption*. Washington DC: The World Bank.
- Sugiyono, 1999. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Ketujuh. Alfabeta: Bandung.
- Suparto, 1987. *Sosiologi dan Antropologi SMA Jilid 1*. CV. Armico. Bandung.
- Syamsul, 2013. *Persepsi Masyarakat Terhadap Korupsi Di Kutai Kartanegara*. *Jurnal Konsentrasi Sosiologi* Vol.1 No.3
- Tanzi, Vito. 1998. *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures*. International Monetary Fund Staff Papers Vol. 45 No. 4.

Transparency International Indonesia. 2015. *Corruption Perception Index Tahun 2015*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.